

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Sutedi Adrian, 2011, *Sertifikat Hak atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Parlindungan A.P. (III), 1990, *Konversi Hak-Hak Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung.

Black Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, USA.

Satriyo Wibowo Ari, 2004, *27 Siasat Jitu Menembus Pasar Sekaligus Meraih Posisi Pemimpin Pasar*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.

Effendie Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*, Alumni, Bandung.

Harsono Boedi, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Ginting Darwin, 2010, *Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Setyadi Didik S, 2009, *Aspek Hukum Administrasi Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak Dan Gas Bumi Di Indonesia*, Nus Makr Institute, Jakarta.

Saragih Djaren, 1980, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.

Perangun Effendi (I), 1994, *Hukum Agraria Indonesia Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktis Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Hadikusuma Hilman, 1990, *Hukum Perjanjian Adat*, PT.Citra Aditya bakti, Bandung.

Salindeho John, 1993, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Grafika, Jakarta.

S.W.Sumardjono Maria, 2009, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.

Kuncoro Mudradjad, et al, 2009, *Transformasi Pertamina : Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, Galangpress Yogyakarta.

Setiawan R, 1994, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

Subekti R, 1987, *Hukum Perjanjian*, Internusa, Jakarta.

Subekti R., 1977, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.

Hanitijo Soemitro Ronny, 1985, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Gahlia Indonesia, Jakarta.

Murad Rusmadi, 1997, *Administrasi Pertanahan*, Mandar Maju, Bandung.

H.S Salim, 2006, *Pengantar Hukum Pedata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 2008, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press, Jakarta.

Gautama Sudargo, 1990, *Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria*, Citra aditya Bhakti, Bandung.

Mertokusumo Sudikno, 1988, *Diktat Kursus Hukum Perikatan*, Ujung Pandang.

Mertokusumo Sudikno, 1985, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.

Prima Pena Tim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media press.

Santoso Urip (II), 2007, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta.

Universitas Indonesia Dewan Guru Besar, 2010, *Simposium Nasional Tanah untuk Kepentingan dan Kesejahteraan Rakyat*, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Depok.

## **B. Makalah/Pidato**

Didik S Setyadi, Bahan Presentasi Kepala Kelompok kerja Formalitas SKK Migas, 2015, *Presentasi*, Workshop “Pengadaan Tanah Sektor Hulu Migas di Provinsi Sumatera Barat: Membedah Realitas Untuk Melahirkan Gagasan dan Solusi Konkrit” PT. Radiant Bukit Barisan E&P, Padang, 14 Februari 2016.

Kurnia Warman, Pengadaan Tanah (Ulayat) untuk Usaha Hulu Migas di Sumatera Barat, *Presentasi*, Workshop “Pengadaan Tanah Sektor Hulu Migas di Provinsi Sumatera Barat: Membedah Realitas Untuk Melahirkan Gagasan dan Solusi Konkrit” PT. Radiant Bukit Barisan E&P, Padang, 14 Februari 2016.

## **C. Internet**

B.Sugiharto dan Pudyo Saptono, “ UU Pengadaan Tanah Hambat Eksplorasi”. *Suara Karya* (3 April 2012), <http://www.migas.esdm.go.id>

Eddy Leks, “Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, <http://eddyleks.blog.kontan.co.id/2012/09/10/penyelenggaraan-pengadaan-tanah-bagi-pembangunan-untuk-kepentingan-umum/>, diakses tanggal 25 Oktober 2016

Indonesian Legal Brief, Hukum Online. <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 27 Oktober 2016

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-4.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok –Pokok Agraria, (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 81 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4216).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280).

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 123 tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435).

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 156 tahun 2012).

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 226 Tahun 2012).

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 2013).

Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Nomor 266)

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Pedoman Tata Kerja BP Migas Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah.

Surat Keputusan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas bumi Nomor KEP-0113/BP000000/2007/S0 tentang Pedoman Tata Kerja Pengadaan Tanah.

Surat Keputusan SKK MIGAS Nomor KEP-0244/SKKO000/2014/SO, Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015